

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015**

Syaibatul Hamdi
Universitas Pamulang, Banten
syaibatul.hamdy56@gmail.com

Submitted: 07th July 2018/ **Edited:** 24th July 2018/ **Issued:** 01th October 2018
Cited on : Hamdi, Syaibatul. (2018). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Moderating* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4), 81-90.

DOI: 10.5281/zenodo.1437010
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1437010>

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how big influence of capital structure to tax aggressiveness. In addition, this study also examined the moderating role of profitability for the effect of capital structure on tax aggressiveness. The research was conducted on consumer goods sector manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The type of this research is quantitative research, while the sampling technique is done by using purposive sampling method. The sample of this research is 8 companies period of year 2011-2015. The independent variable in this research is Capital Structure. Then the dependent variable in the form of Tax Aggressiveness and Moderation Variable is Profitability. The analytical method used is classical assumption test method, linear regression, t test analysis, f test analysis, and path analysis using computer program SPSS version 22.0 and Microsoft Excel 2010. Based on the results of research conducted, pointed out that partially capital structure effect on aggressiveness taxes, and profitability moderate the effect of capital structure on tax aggressiveness.

Keywords: Capital Structure, Tax Aggressiveness, Profitability

PENDAHULUAN

Pada satu pihak pajak adalah penerimaan negara, namun di pihak lain pajak adalah pengeluaran bagi perusahaan. Oleh karenanya dalam perspektif bisnis perusahaan akan menekan segala biaya yang dipandang beban bagi perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin berkurang. Maka dalam prakteknya banyak perusahaan melakukan efisiensi dan optimalisasi operasional bisnis sehingga segala beban termasuk pajak tidak

mengganggu pendapatan perusahaan.

Namun dari sudut pandang lain, pajak dalam perspektif kebijakan ekonomi memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Misalnya mendapatkan berbagai kemudahan dalam hal perizinan, mendapatkan potongan atau keringanan pajak, mendapatkan prioritas kebijakan dan lain sebagainya sehingga dalam operasionalnya di lapangan dapat dilaksanakan secara lancar.

Lebih lanjut, secara umum pajak memiliki hubungan yang searah dengan profitabilitas, di mana keuntungan naik maka pajak pun naik, demikian sebaliknya jika pajak yang dibayarkan turun menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan menurun. Oleh karena pajak memiliki sisi baik dan sisi kurang baik, maka sikap perusahaan tetap harus patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Mengingat, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah secara langsung terasa oleh perusahaan dalam hal fasilitas bisnis, pembangunan infrastruktur yang memudahkan perusahaan melakukan mobilisasi bisnis (jalan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya), perbaikan sistem perizinan yang membuat ruang gerak perusahaan menjadi lebih lancar dan yang terakhir, manfaat pajak dapat membangun pertumbuhan ekonomi domestik sehingga banyak investor yang datang dengan demikian pangsa pasar di Indonesia tumbuh dan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, kemampuan perusahaan dalam membayar pajak tidak terjadi secara tiba-tiba atau serta merta. Namun dipengaruhi oleh seberapa baik struktur modal perusahaan. Kokohnya struktur modal menjelaskan tingginya kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan bisnisnya, dengan optimalisasi tersebut dimungkinkan sumber penghasilan perusahaan banyak dan jumlahnya besar. Maka tidak heran, di lantai bursa (BEI) setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan suntikan dana dari para investor. Selain itu peran serta pemerintah sebagai pemegang regulasi memiliki andil dalam menjalankan sistem permodalan tersebut, dan salah satu anggarannya yang paling besar diperoleh dari pajak perusahaan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, fenomena yang banyak terjadi di lapangan berkenaan dengan pajak adalah kecurangan pajak. Banyak cara dilakukan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakali dan memanipulasi agar pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan apa yang dikenakan oleh pasal yang berlaku. Sikap ini sering kali muncul lantaran minimnya kesadaran wajib pajak yang diakibatkan

oleh peran pemerintah yang kurang edukatif. Terlebih banyaknya kasus korupsi terhadap dana pajak menyebabkan menurunnya kepercayaan wajib pajak.

Selain masalah di atas, sejauh ini pemerintah belum inovatif dalam mengelola dana pajak. Hal ini terlihat dari tingkat kebermanfaatan pajak atau produktivitas pajak yang tidak jelas ke mana disalurkan dan apa manfaat yang oleh wajib pajak secara langsung. Maka tidak heran baik wajib pajak individu maupun perusahaan banyak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajak.

LANDASAN TEORI

Menurut Kartini dan Arianto (2008: 15) struktur modal adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total aset. Menurut Sartono (2001:77) struktur modal di *proxy* dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang merupakan perbandingan antara total hutang terhadap modal sendiri.

Menurut Harahap (2008:219) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Brigham dan Houston (2006:107) profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.

Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) agresivitas pelaporan pajak adalah aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi *moderating* atau biasa disebut dengan metode MRA (*Moderating Regression Analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan apakah ada perbuatan curang yang dilakukan oleh perusahaan yang dilihat dari sudut pandang rasio keuangan yakni struktur modal dan profitabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait. Adapun tahapan analisis terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, uji moderasi, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel *moderating* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan fasilitas elektronik dengan menggunakan SPSS 22, untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel penelitian yaitu 8 yang dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria Sampel

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Perusahaan yang bergerak disektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2015.	39
2	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang lengkap selama periode pengamatan tahun 2011-2015.	15
3	Perusahaan yang terpilih menjadi sampel	8

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pengambilan sampel secara *purposive sampling* di atas, sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak disektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 39 perusahaan. Kriteria kedua yaitu perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang lengkap selama periode pengamatan tahun 2011-2015 berjumlah 15 perusahaan, sementara sebanyak 24 perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Dan perusahaan yang di jadikan sampel penelitian adalah 8 perusahaan, selama periode 5 tahun sehingga total data yang digunakan 40 data. Dari pembatasan sampel maka dijelaskan nama-nama perusahaan sampel dalam sebagai berikut.

Tabel 2. Sampel Penelitian

NO	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN
1	PT.Darya Varia Laboratoria	DVLA
2	PT.Kimia Farma	KAEF
3	Kalbe Farma	KLBF
4	PT. Unilever Indonesia	UNVR
5	PT. Indofood Sukses	INDF
6	PT. Nippon Indosari	ROTI
7	PT. Ultra Jaya Milk Industri	ULTJ
8	PT. Sekar Laut	SKLT

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka objek penelitian ini terdiri dari 8 perusahaan yang selanjutnya dijadikan unit analisis dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	33,485	7,264		4,610	,000		
Struktur	,097	,024	,498	3,980	,000	,986	1,014
Profitabilitas	-1,004	,256	-,490	-3,923	,000	,986	1,014

a. Dependent Variable: agresifitas pajak

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2017

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi masalah multikolonieritas penelitian ini *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Regresi yang terbebas dari masalah multi 0,10 dan $VIF \leq 10$. Berdasarkan Tabel hasil uji multikolonieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel independen yaitu struktur modal sebesar 0,986, dan profitabilitas sebesar 0,986 menunjukkan nilai lebih dari $> 0,10$ dan nilai *VIF* dari variabel independen yaitu struktur modal sebesar 1,014 dan profitabilitas sebesar 1,014 menunjukkan nilai tidak lebih dari < 10 , oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. Uji Hipotesis 1

Model			Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,581	2,814		2,338	,025
x1	,086	,029	,439	3,014	,005

Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2017

Hasil olah data di atas menunjukkan bahwa struktur modal (x1) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.439, nilai t

hitung sebesar 3.014 lebih besar dari t tabel sebesar 2,024 dan nilai signifikan t_{hitung} sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa struktur modal menjadi salah satu celah bagi para pengusaha untuk mengurangi nominal pajak, yakni dengan menjadikan pendapatan operasional sebagai beban-beban perusahaan sehingga pembayaran pajak perusahaan tidak terlalu membengkak. Selain itu, struktur modal memiliki ruang bebas bagi para pengusaha untuk mengelola pendapatan usaha sebelum di bayarkan, misalnya dengan melakukan ekspansi bisnis, melakukan peremajaan kantor dan peralatan kantor, membeli persediaan bahan baku dan lain sebagainya.

Perbuatan di atas secara legal tidak melanggar aturan, namun sebagai konsekuensinya penerimaan pajak pemerintah menjadi berkurang. Kondisi ini sebaiknya dapat mengingatkan perusahaan agar lebih bijak dalam membuat kebijakan pajak dan menyediakan administrasi pajak yang mendidik. Pemerintah tidak hanya memungut pajak, namun secara proaktif pemerintah melalui dirjen pajak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan metode timbal balik. Artinya ada sesuatu yang diterima oleh perusahaan setelah mereka membayar pajak. Misalnya berupa pemberian akses kepada investor, akses kepada konsumen, akses kepada suplier, dan lain sebagainya, dengan demikian mereka merasa membayar pajak bukanlah beban, melainkan bagi untung.

Selain itu, pemerintah perlu serius mengelola pajak yakni menggunakan pajak dalam rangka pembangunan nasional, misalnya menyalurkan pajak dalam bentuk subsidi bahan bakar, subsidi listrik, pembangunan akses jalan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan lain sebagainya, dengan demikian dampaknya terasa langsung kepada perusahaan dan perusahaan merasa puas karena telah dapat ikut berpartisipasi memajukan masyarakat Indonesia.

Kecerdasan pemerintah dalam mengelola pajak dapat menekan perilaku kecurangan wajib pajak. Oleh karenanya sudah saatnya pemerintah melakukan inovasi atau perbaikan dalam pemanfaatan pajak dan termasuk sistem pembayaran pajak yang mudah dan menyenangkan. Dampak dari upaya tersebut diharapkan para wajib pajak badan dapat secara maksimal mengelola usahanya dengan melihat struktur modal yang kemudian muncul perilaku wajar dalam pembayaran pajak, tanpa adanya niat untuk melakukan kecurangan.

Tabel 5. Uji Hipotesis 2

Model			Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,955	20,804		-,334	,740
x1	,486	,190	2,479	2,561	,015
Z	,543	,789	,265	,688	,496
Moderating	-,015	,007	-2,216	-2,063	,046

Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2017

Hasil olah data di atas, memperlihatkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak yang dimediasi oleh profitabilitas dengan koefisien regresi sebesar -2.216, nilai t hitung sebesar -2.063 lebih kecil dari -2,024 dan nilai signifikansi sebesar 0.046 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya jika struktur modal yang dimediasi oleh profitabilitas meningkat sebesar 1 satuan maka agresivitas pajak menurun sebesar -2.216.

Temuan di atas cukup mengejutkan, di mana secara statistik menunjukkan bahwa jika perusahaan memiliki banyak keuntungan maka perilaku kecurangan dalam hal mengurangi nominal pajak menjadi berkurang dilihat dari sisi struktur modal. Tentunya temuan cukup memberikan kabar gembira bagi pemerintah, karena faktanya perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari bisnisnya maka dimungkinkan perilaku kecurangan dalam perpajakan semakin mengecil, dan tingkat penurunannya cukup signifikan yakni di angka 2 digit. Ini artinya pemerintah ditantang untuk dapat hadir sebagai fasilitator bagi kesuksesan perusahaan. Dengan pajak yang diterima maka seyogyanya pemerintah mendukung menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar perusahaan menjalankan usahanya. Misalnya dengan memberikan subsidi bahan bakar, memberikan subsidi listrik, membangun komunikasi dengan para investor dan lain sebagainya. Pajak juga dapat dikelola dalam bentuk sosial, misalnya disalurkan untuk pendidikan di daerah tertinggal, untuk bantuan bencana, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya sehingga perusahaan merasa itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang mereka harus membayarnya melalui pajak.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2296,021	3	765,340	11,543	,000 ^b
	Residual	2386,867	36	66,302		
	Total	4682,888	39			

Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2017

Hasil analisis di atas menunjukkan struktur modal dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa H_a diterima dan H_0 di tolak. Artinya jika struktur modal dan profitabilitas meningkat maka agresivitas pajak meningkat. Temuan ini menegaskan bahwa dalam model simultan profitabilitas dan struktur modal dapat memicu munculnya perilaku kecurangan pajak. Tentunya kondisi ini perlu diwaspadai, terutama bagi pemerintah, perlu kiranya Dirjen Pajak membuat sebuah kebijakan yang dapat menyadarkan wajib pajak badan sadar akan manfaat pajak yang dibayarkannya, baik manfaat yang dirasakan langsung berupa subsidi yang diterima maupun tidak langsung seperti mendapatkan manfaat akses jalan yang memadai.

Lagi – lagi pemerintah dituntun untuk kreatif dalam mengelola pajak dan terbuka dalam proses pemanfaatannya. Diharapkan pemerintah tidak hanya mendapatkan manfaat pajak dari perusahaan atau masyarakat, akan tetapi pemerintah sudah mulai berorientasi pada pengelolaan pajak yang manfaatnya kembali lagi kepada perusahaan dan masyarakat. Kemudian dalam pengelolaannya pemerintah perlu akuntabel agar pajak yang diterima dari masyarakat tidak dikorupsi oleh sebagian oknum-oknum pegawai pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak.

Faktanya banyak masyarakat kecewa dan berdampak enggan membayar pajak karena banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negeri sipil dan pejabat daerah. Kondisi ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah, karena dianggap tidak mampu mengelola pajak dengan baik.

Sekali lagi temuan ini mengingatkan pemerintah bahwa struktur modal yang baik yang secara bersamaan diikuti oleh pendapatan yang meningkat memicu lahirnya perilaku curang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Diharapkan semua pihak berupaya semaksimal mungkin agar dapat mencegah terjadinya kecurangan. Memang

secara psikologis, wajar jika masyarakat atau perusahaan enggan memberikan sejumlah uang tertentu baik kecil maupun besar kepada orang lain, karena mendapatkannya tidak mudah, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditandai dengan nilai signifikan pada uji T sebesar 0,005 ($<0,05$). Artinya jika struktur modal meningkat sebesar 1 satuan maka agresivitas pajak meningkat, dan ini perlu diwaspadai.
2. Profitabilitas memoderasi Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini ditandai dengan nilai signifikan pada uji T yang memoderasi sebesar (0,046 $< 0,05$). Artinya model moderasi sejalan dengan analisis sebelumnya jika struktur modal meningkat melalui profitabilitas maka akan meningkatkan agresivitas pajak meningkat, dan ini perlu diwaspadai.

Temuan di atas memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah harus kreatif dalam meyakinkan wajib pajak misalnya dengan membuat sistem pembayaran yang mudah dan cepat berbasis teknologi.
2. Pemerintah harus inovatif dalam mengelola pajak, yakni menyalurkan pajak dalam bentuk bantuan langsung kepada wajib pajak misalnya berupa pemberian subsidi, akses jalan, akses investor, akses konsumen, akses supplier dan lain sebagainya.
3. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang teladan, misalnya berupa potongan pajak atau yang lainnya.
4. Perusahaan perlu menyadari bahwa kewajibannya adalah membayar pajak, sehingga perlu sikap fokus dan komitmen untuk taat membayar pajak.
5. Diharapkan temuan ini memberikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan fenomena serupa namun dengan analisis yang lebih terperinci, sehingga ditemukan secara spesifik masalah utamanya.
6. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran, bahwa tindakan curang dalam pajak adalah perbuatan melanggar hukum, etika dan norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Brigham, Eugene F dan Houston. 2006. *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hlaing, K.P. 2012. *Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. Canada: University of Waterloo.
- Kartini dan Arianto, Tulus. 2008. Struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 12, No. 1. Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Merdeka Malang.